



USULAN BARU DITINDAKLANJUTI TAHUN DEPAN

Uji Publik KMS 2017 Hanya Dua Pekan

YOGYA (KR) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya mulai menggelar uji publik tahap kedua terhadap calon pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) 2017. Pemaparan hasil pendataan warga miskin tersebut pun hanya dilakukan selama dua pekan hingga 25 November 2016.

Dalam uji publik kedua itu petugas Dinsosnakertrans memaparkan calon pemegang KMS 2017 yang dinyatakan lolos sesuai parameter. Sebelumnya, terdapat 24.270 kepala keluarga (KK) yang dilakukan pendataan. Terdiri dari 18.730 KK penerima KMS tahun ini ditambah 5.540 KK usulan dari wilayah.

"Pendataan dilakukan hingga beberapa bulan karena harus dicek sesuai parameter. Saat ini sudah ada hasilnya, dan sedang kami uji publik ke masyarakat," ungkap Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya Hadi Muhtar, Jumat (18/11).

Kendati dari sisi jumlah calon pemegang KMS 2017 sudah bisa diketahui, namun

pihaknya belum berani membeberkan ke publik. Pasalnya, usai uji publik masih memungkinkan ada perubahan. Terutama pengurangan jumlah akibat pindah domisili maupun dinilai sudah tidak miskin.

Hadi Muhtar menjelaskan, uji publik tahap kedua ini digelar tiap kelurahan. Dalam sehari, rata-rata ada tiga kelurahan yang disambangi. Pihaknya turut mengundang perangkat RT dan RW, penggerak PKK, LPMK, serta tokoh masyarakat. "Pihak yang kami undang itu akan mencermati data hasil pendataan. Mereka hanya bisa

mencoret nama yang dinilai sudah tidak berhak. Jadi tidak ada usulan baru," imbuhnya.

Oleh karena itu, usulan baru akan ditindaklanjuti tahun depan. Apalagi tiap awal tahun juga digelar uji publik tahap pertama guna menjaring masukan dari masyarakat.

Kepala Seksi Strategi Penanganan Masalah Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogya Esti Setiarsa mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim guna melakukan verifikasi cepat. Pengalaman tiap tahun, saat digelar uji publik tahap kedua, ada be-

berapa nama yang mendapat sorotan dari masyarakat. "Itu kami anggap masukan dan membutuhkan proses verifikasi ulang. Makanya harus ada tim yang siap bergerak cepat karena waktu sangat terbatas," jelasnya.

Esti berharap, uji publik kedua ini dapat dituntaskan sesuai target. Dengan begitu pihaknya masih memiliki waktu satu bulan guna melakukan perbaikan data sebelum diajukan ke kepala daerah. Sebelum 31 Desember 2016, daftar calon pemegang KMS 2017 tersebut harus sudah dapat ditetapkan.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005